



## Pengaruh *E-Government* dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Herawansyah\*, Nikmah<sup>2</sup>, Halimatusyadiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Bengkulu, Indonesia

Korespondensi Penulis : [herawansyah@unib.ac.id](mailto:herawansyah@unib.ac.id)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of E-Government and the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on Regional Financial Management Accountability. Using a quantitative approach with 118 respondents, this study shows that the instruments used are valid, reliable, and meet all classical assumption tests so that they are suitable for analysis using multiple linear regression. The results of the study show that E-Government has a positive and significant effect on accountability, which means that the better the implementation of government digital services, the higher the financial accountability achieved. Furthermore, SIPKD proved to be the most dominant variable, providing a stronger influence in improving accountability because of its role directly related to financial recording, administration, and reporting in an integrated manner. Simultaneously, the two variables explain the 54.4% variation in accountability. These findings are consistent with the theory of Technology Acceptance Model, Good Governance, and previous research findings that affirm that the digitalization of the financial system and public services is very important in realizing transparent and accountable government financial management. Overall, the study concludes that digitalization through E-Government and SIPKD plays a major role in improving accountability, with SIPKD being the most significant component. The research recommends increasing human resource capacity, strengthening digital infrastructure, and integrating policies to maximize the use of these two systems.*

**Keywords:** *E-Government; Local government; Management Accountability; Regional Financial; Regional Information System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh E-Government dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 118 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid, andal, dan memenuhi semua uji asumsi klasik sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan multiple linear regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Government memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, yang berarti bahwa semakin baik implementasi layanan digital pemerintah, semakin tinggi akuntabilitas keuangan yang dicapai. Selanjutnya, SIPKD terbukti menjadi variabel yang paling dominan, memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam meningkatkan akuntabilitas karena perannya yang berhubungan langsung dengan pencatatan, administrasi, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi. Secara bersamaan, kedua variabel tersebut menjelaskan variasi akuntabilitas sebesar 54,4%. Temuan ini konsisten dengan teori Model Penerimaan Teknologi, Good Governance, dan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan dan pelayanan publik sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi melalui E-Government dan SIPKD berperan besar dalam meningkatkan akuntabilitas, dengan SIPKD menjadi komponen yang paling signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, dan mengintegrasikan kebijakan untuk memaksimalkan penggunaan kedua sistem ini.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Manajemen Keuangan Regional; Pemerintahan Daerah; Pemerintahan Elektronik; Sistem Informasi Regional.

## **1. LATAR BELAKANG**

Era digitalisasi yang semakin berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penerapan E-Government dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi strategi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. E-Government memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sementara SIPKD berfungsi sebagai alat untuk mengelola proses keuangan daerah secara terintegrasi. Implementasi E-Government di tingkat pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana publik. Sebagai contoh, studi oleh Nurindahsari dan Trisyanto (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi E-Government di Pemerintah Kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 71,2%.

Penerapan E-Government tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu permasalahan yang krusial adalah kurangnya keselarasan antara pengembangan sistem teknologi informasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Selain itu, banyak daerah masih menghadapi hambatan seperti infrastruktur teknologi yang belum memadai, rendahnya literasi digital pegawai, serta lemahnya komitmen kelembagaan dalam mendukung transformasi digital. Di beberapa kasus, sistem E-Government yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara optimal karena resistensi terhadap perubahan budaya kerja manual ke digital. Tantangan ini menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan peran E-Government sebagai pendorong akuntabilitas keuangan.

Selain E-Government, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPKD merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan SIPKD, pemerintah daerah dapat memantau realisasi anggaran secara real-time, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan proses audit dan evaluasi. Penelitian oleh Dewi dan Wulandari (2023) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa implementasi SIPKD memberikan

manfaat signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel .

Implementasi SIPKD di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian oleh Khumaidi et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKDA) berbasis IT Governance dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sebesar 45%, mengurangi waktu pemrosesan laporan keuangan hingga 60%, dan meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah hingga 80%. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di masing-masing daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah telah mengembangkan SIPKD untuk mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Namun, implementasi sistem ini di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis. Evaluasi terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penelitian oleh Fitriani dan Solikhin (2023) menunjukkan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dimediasi oleh kemampuan teknologi informasi. Namun, meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasi E-Government dan SIPKD di pemerintah daerah. Menurut laporan Kompas (2024), sebanyak 66 pemerintah daerah di Indonesia belum mengoptimalkan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu, telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan dalam penerapan sistem ini masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini berdampak pada tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Bafriansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan akuntabilitas yang baik, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya. Namun, masih terdapat desa-desa di Kabupaten Rejang Lebong yang menghadapi tantangan dalam mencapai akuntabilitas yang optimal.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat gap riset dalam memahami secara mendalam pengaruh E-Government dan SIPKD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis implementasi sistem informasi, tanpa mengkaji secara komprehensif dampaknya terhadap akuntabilitas. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Government dan SIPKD.

Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan E-Government dan SIPKD dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi implementasi sistem informasi yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam memahami perilaku pengguna terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) dan menekankan bahwa terdapat dua konstruk utama yang menentukan niat seseorang dalam menggunakan suatu sistem teknologi, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan *perceived ease of use* merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan. Kedua faktor ini berpengaruh langsung terhadap sikap pengguna terhadap teknologi dan pada akhirnya memengaruhi keputusan aktual untuk menggunakan sistem tersebut.

Implementasi *E-Government* dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), TAM menjadi sangat relevan untuk menjelaskan sejauh mana pegawai pemerintah daerah bersedia menerima dan menggunakan sistem digital dalam proses pengelolaan keuangan publik. Apabila sistem dianggap bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi kerja, transparansi data, serta mempermudah proses pelaporan keuangan, maka tingkat adopsinya akan cenderung lebih tinggi (Venkatesh & Davis, 2000). Sebaliknya, jika sistem dianggap rumit, tidak intuitif, atau tidak mendukung kebutuhan kerja, maka pengguna akan enggan memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap kemudahan dan kemanfaatan SIPKD dan E-

Government sangat menentukan efektivitas keduanya dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya oleh Ramli dan Fitri (2021) juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kepraktisan dan manfaat sistem dalam menunjang tugas-tugas administratif.

### ***Good Governance Theory***

*Good Governance Theory* merupakan landasan teoretis penting dalam kajian tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Teori ini menyoroti bahwa pengelolaan sektor publik yang baik tidak hanya bergantung pada peraturan dan struktur formal, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai tata kelola yang menjamin bahwa pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka kepada publik (UNDP, 1997; World Bank, 2000). Pengelolaan keuangan daerah, prinsip akuntabilitas menjadi pilar utama yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pengelolaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Penerapan *E-Government* dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) dapat dilihat sebagai wujud konkret dari upaya membangun good governance dalam pemerintahan daerah. Teknologi informasi berperan sebagai katalisator dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui otomatisasi pelaporan, pemantauan anggaran secara real-time, serta penyediaan data keuangan yang dapat diakses publik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah (Nurmandi & Kim, 2015). Penelitian oleh Rahayu dan Pertiwi (2022) menunjukkan bahwa adopsi prinsip-prinsip good governance yang ditunjang oleh teknologi informasi mampu menurunkan potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam kerangka teori ini, sistem digital seperti SIPKD dan *E-Government* tidak hanya dipandang sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance ke dalam desain dan implementasi sistem informasi akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat serta lemahnya kontrol terhadap penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap entitas pemerintahan daerah untuk

menjadikan Good Governance Theory sebagai panduan utama dalam merancang dan menerapkan sistem informasi keuangan secara efektif.

### ***Institutional Theory***

*Institutional Theory* menjelaskan bahwa perilaku organisasi, termasuk dalam sektor publik, sangat dipengaruhi oleh norma, nilai, aturan, dan tekanan eksternal yang berkembang dalam lingkungan kelembagaan mereka. Teori ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya beroperasi berdasarkan rasionalitas teknis dan efisiensi semata, tetapi juga karena adanya tekanan institusional yang bersifat koersif, normatif, dan mimetik (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan sistem E-Government dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) sering kali bukan hanya keputusan internal organisasi, tetapi juga merupakan respons terhadap tekanan dari pemerintah pusat, tuntutan regulasi, ekspektasi publik, serta praktik terbaik dari daerah lain yang dianggap sukses.

Tekanan koersif muncul dari kewajiban formal seperti peraturan perundang-undangan atau kebijakan nasional yang mewajibkan penerapan sistem informasi tertentu. Misalnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penggunaan SIPKD sebagai bagian dari sistem informasi pemerintahan daerah memberikan tekanan legal yang kuat kepada pemerintah daerah untuk mengadopsinya. Sementara itu, tekanan normatif bersumber dari harapan profesional, seperti rekomendasi dari auditor atau lembaga pengawas yang mendorong implementasi sistem untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi keuangan. Tekanan mimetik terjadi ketika suatu daerah meniru praktik keberhasilan daerah lain dalam menerapkan sistem digital demi memperoleh legitimasi dan meningkatkan citra institusi (Scott, 2008).

*Institutional Theory* juga menjelaskan bahwa meskipun organisasi telah mengadopsi teknologi baru seperti SIPKD atau *E-Government*, belum tentu adopsi tersebut mencerminkan perubahan substantif jika tidak diiringi dengan perubahan budaya, nilai organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Hal ini dikenal sebagai fenomena decoupling, yaitu ketika adopsi formal atas suatu inovasi tidak diikuti oleh perubahan praktik aktual di lapangan (Meyer & Rowan, 1977). Dalam kasus pemerintah daerah, hal ini sering terlihat ketika sistem informasi telah diimplementasikan, namun masih terjadi pelaporan manual, penggunaan ganda sistem, atau resistensi dari aparatur karena belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat sistem tersebut. *Institutional Theory* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa keberhasilan penerapan E-Government dan SIPKD tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh konteks kelembagaan yang melingkupinya. Pemahaman terhadap tekanan institusional ini penting agar reformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya

menjadi simbol kepatuhan formal, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan akuntabilitas yang nyata.

### ***E-Government***

*E-Government* merupakan konsep transformasi digital dalam sektor publik yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Heeks (2006), *E-Government* dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat proses penyampaian informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi hambatan birokrasi yang kaku. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, penerapan *E-Government* bertujuan untuk memperbaiki mekanisme pelayanan, memperkuat sistem pengawasan, dan membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.

*E-Government* menjadi alat strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui digitalisasi proses anggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan integrasi data keuangan yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja, sehingga informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan itu, Indrajit (2004) menyatakan bahwa penerapan *E-Government* dapat mempercepat penyampaian informasi publik, memperkecil peluang terjadinya penyimpangan anggaran, serta meningkatkan kontrol sosial terhadap aktivitas keuangan pemerintah.

Keberadaan *E-Government* memberikan peluang untuk mengotomatisasi berbagai proses administrasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya kesalahan manusia (human error) dan peluang praktik korupsi karena adanya jejak digital yang dapat diaudit. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Dwivedi et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan *E-Government* berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik karena memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih sistematis terhadap penggunaan sumber daya keuangan negara. Sistem *E-Government* juga menciptakan struktur pelaporan yang lebih transparan dan terstandarisasi, sehingga memudahkan lembaga pengawas maupun masyarakat dalam mengakses dan menilai kinerja pemerintah daerah.

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung seluruh proses pengelolaan keuangan

daerah secara terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban fiskal. Menurut Mardiasmo (2009), sistem informasi keuangan yang terstruktur dan berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. SIPKD dikembangkan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan secara manual, seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta kurangnya konsistensi dan integritas data anggaran.

Penelitian oleh Aulia et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi SIPKD dapat mengurangi risiko terjadinya fraud dan meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan daerah. SIPKD memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real-time, sehingga pihak manajemen dan pengambil kebijakan dapat dengan cepat mendeteksi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Selain itu, sistem ini juga memfasilitasi proses audit dan evaluasi oleh lembaga pengawas, seperti BPK dan Inspektorat Daerah, karena data keuangan terdokumentasi secara digital dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan audit. Hal ini sejalan dengan pendapat Romney dan Steinbart (2015), yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi sangat membantu dalam meningkatkan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di sektor publik.

Fitriani dan Solikhin (2023), SIPKD juga memberikan manfaat strategis dalam memperkuat akuntabilitas publik karena memungkinkan penyediaan informasi yang transparan kepada masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi, sistem ini berperan dalam memberikan akses yang lebih luas kepada publik terhadap informasi pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keberhasilan penerapan SIPKD sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung, seperti kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

SIPKD bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Integrasi SIPKD dengan sistem e-government lainnya akan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merujuk pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengelolaan keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi dan tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik harus dijaga dan diawasi secara ketat. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas dalam sektor publik berarti bahwa entitas pemerintahan harus mampu menjelaskan kepada pihak yang memberikan otoritas, yaitu masyarakat, mengenai bagaimana sumber daya telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan. Sistem akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai melalui penerapan sistem informasi yang handal, penguatan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fitriana dan Wardhani (2021) yang menunjukkan bahwa penguatan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Semakin terbuka pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja dan kredibilitas pemerintah daerah.

## **Kerangka Penelitian**

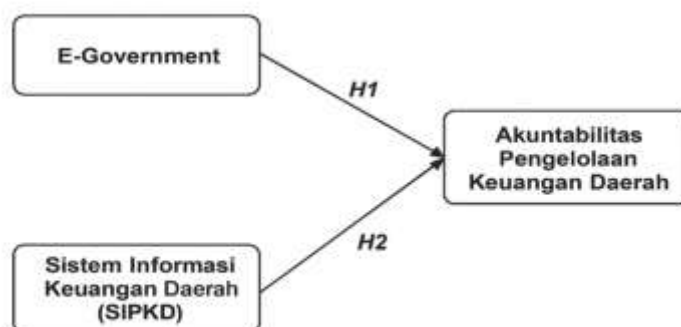
Dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya melalui

penerapan *E-Government* dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Penerapan *E-Government* memungkinkan proses pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien dengan mengurangi praktik birokrasi konvensional, mempercepat proses penyampaian informasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Teknologi ini juga dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, SIPKD menyediakan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Keberadaan SIPKD memungkinkan monitoring real-time, audit yang lebih akurat, dan pencatatan yang terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), keberhasilan implementasi kedua sistem ini dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan oleh pegawai pemerintah daerah. Sementara itu, dari perspektif *Good Governance Theory*, keberadaan sistem berbasis teknologi ini diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, *Institutional Theory* menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan, baik dari regulasi maupun norma profesional, menjadi pendorong utama dalam adopsi sistem ini.

Dengan mempertimbangkan teori-teori tersebut, dapat disusun kerangka berpikir bahwa semakin baik implementasi E-Government dan SIPKD, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *E-Government* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2: Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah kuantitatif asosiatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat dan menguji hubungan antara dua variabel atau lebih secara nyata berdasarkan data. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya ingin mengetahui apakah variabel-variabel tersebut saling berhubungan, tetapi juga mencoba memahami apakah terdapat pengaruh atau hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan hasil yang lebih objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik, sehingga temuan penelitian diharapkan lebih akurat dan dapat dipercaya, khususnya dalam menjelaskan fenomena terkait penerapan sistem informasi di sektor publik.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Fokusnya adalah pada pegawai yang sehari-hari menggunakan *sistem E-Government* dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengoperasikan sistem tersebut. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai sumber informasi yang paling tepat untuk menilai sejauh mana sistem tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut mencakup pegawai yang bekerja di bidang keuangan, perencanaan, atau akuntansi, memiliki masa kerja minimal satu tahun agar sudah memahami alur kerja dan sistem yang digunakan, serta aktif menggunakan SIPKD atau E-Government dalam tugasnya. Pemilihan kriteria ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari responden yang berpengalaman dan relevan dengan topik penelitian.

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
E-Government ( $X_1$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas sistem digital pemerintah daerah</li> <li>2. Ketersediaan layanan keuangan secara online</li> <li>3. Efisiensi waktu dan biaya dalam proses keuangan</li> <li>4. Transparansi data dari sistem</li> <li>5. Tingkat pemanfaatan sistem oleh pegawai</li> </ol>	Likert	Indrajit (2002)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan input dan akses data keuangan</li> <li>2. Ketersediaan pelaporan dan monitoring real-time</li> <li>3. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna</li> <li>4. Keamanan dan keandalan data</li> <li>5. Dukungan teknis dan pelatihan pengguna</li> </ol>	Likert	Permendagri No. 13 Tahun 2006
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintahan</li> <li>2. Keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat</li> <li>3. Ketepatan waktu pelaporan keuangan</li> <li>4. Tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan</li> <li>5. Mekanisme audit dan tindak lanjut hasil audit</li> </ol>	Likert	Mardiasmo (2009)

Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian sehingga mampu menggambarkan kondisi yang diteliti secara lebih menyeluruh. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan juga melalui *Google Form* agar lebih praktis serta menjangkau responden lebih luas. Setelah data terkumpul, pengolahan dan analisis dilakukan menggunakan SPSS melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis utama menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh *E-Government* dan SIPKD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diperkuat dengan uji t dan uji F guna memperoleh kesimpulan yang lebih jelas dan dapat dipercaya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Deskripsi Responden dan Data Penelitian**

Jumlah responden dalam penelitian berjumlah 132 orang, namun setelah melalui proses pemeriksaan kelayakan data, hanya 118 responden yang dinyatakan layak dan dapat diolah lebih lanjut dalam analisis statistik. Data yang tidak diolah berasal dari 14 responden yang mengalami kondisi seperti jawaban tidak lengkap, inkonsistensi pengisian, atau tidak sesuai kriteria responden penelitian. Dengan demikian, tingkat respon valid dalam penelitian ini mencapai 89,39%, yang menunjukkan bahwa tingkat keterisian instrumen cukup baik dan representatif terhadap populasi yang dituju. Proses seleksi ini penting dilakukan agar data yang dianalisis benar-benar mencerminkan kondisi yang akurat dan bebas dari bias akibat informasi

yang tidak lengkap atau kesalahan pengisian. Adapun profil responden dalam penelitian tersaji sebagai berikut:

Responden penelitian sebanyak 118 orang. Berdasarkan kategori jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 72 orang (61,02%), sedangkan responden perempuan berjumlah 46 orang (38,98%). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam lingkungan kerja yang diteliti lebih dominan dibandingkan perempuan, sehingga pandangan dan persepsi yang dihasilkan dari penelitian ini cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh representasi responden laki-laki. Dilihat dari aspek pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 83 orang (70,34%), diikuti oleh responden dengan pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 28 orang (23,73%). Sementara itu, responden yang memiliki pendidikan SLTA/Sederajat dan Diploma/Non-S1 relatif kecil, masing-masing sebesar 3,39% dan 2,54%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konsep sistem informasi, *E-Government*, maupun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika ditinjau dari kategori lama bekerja, responden dengan pengalaman kerja 6–10 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 42 orang (35,59%), diikuti responden dengan lama bekerja 1–5 tahun sebanyak 39 orang (33,05%). Selanjutnya, responden dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun berjumlah 26 orang (22,03%), sedangkan yang bekerja kurang dari 1 tahun hanya 11 orang (9,32%). Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan berada dalam jenjang karier yang relatif matang, sehingga wawasan dan pengalaman mereka dalam menjalankan tugas birokrasi dapat mendukung kualitas jawaban dalam penelitian.

Berdasarkan kategori usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 26–35 tahun sebanyak 47 orang (39,83%), kemudian disusul oleh kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 41 orang (34,75%). Sementara itu, responden dengan usia di atas 45 tahun berjumlah 24 orang (20,34%), dan kelompok usia di bawah 25 tahun hanya 6 orang (5,08%). Distribusi ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh pegawai yang berada pada usia produktif dengan tingkat kedewasaan dan pengalaman kerja yang cukup baik.

## Statistik Deskriptif

**Tabel 2.** Statistik Deskriptif.

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Government (X1)	118	1.00	5.00	3.89	0.672
SIPKD (X2)	118	1.00	5.00	4.05	0.721
Akuntabilitas (Y)	118	1.00	5.00	4.11	0.688
Valid N	118				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel E-Government (X1), SIPKD (X2), dan Akuntabilitas (Y) menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kategori tinggi. Variabel *E-Government* memperoleh nilai mean sebesar 3,89, yang mengindikasikan bahwa penerapan layanan berbasis elektronik dinilai baik oleh sebagian besar responden. Variabel SIPKD memiliki nilai mean 4,05, menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah dianggap efektif dan membantu proses pengelolaan keuangan. Sementara itu, variabel Akuntabilitas memperoleh nilai mean tertinggi, yaitu 4,11, menandakan bahwa responden memandang praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sangat baik. Nilai standar deviasi yang relatif rendah pada ketiga variabel (0,672–0,721) juga menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung konsisten dan tidak memiliki variasi respons yang besar.

Secara keseluruhan, data mencerminkan persepsi positif responden terhadap implementasi sistem dan praktik pengelolaan keuangan yang menjadi objek penelitian.

### Uji Validitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas.

Variabel	Rentang Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
E-Government (X1)	0.612 – 0.745	Sig. < 0.05	Valid
SIPKD (X2)	0.668 – 0.799	Sig. < 0.05	Valid
Akuntabilitas (Y)	0.712 – 0.829	Sig. < 0.05	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada ketiga variabel penelitian dinyatakan valid, ditunjukkan oleh nilai Pearson Correlation yang berada jauh di atas nilai r-tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Pada variabel *E-Government* (X1), nilai korelasi item berada pada rentang 0,612-0,745 sehingga seluruh pernyataan mampu mengukur konstruk *E-Government* secara konsisten. Variabel SIPKD (X2) menunjukkan rentang korelasi yang lebih tinggi, yaitu 0,668-0,799, yang mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan kuat dengan total skor variabel sehingga layak digunakan dalam analisis lanjutan. Sementara itu, variabel Akuntabilitas (Y) memiliki rentang korelasi tertinggi, yaitu 0,712-0,829, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen akuntabilitas memiliki tingkat ketepatan pengukuran yang sangat baik. Dengan nilai signifikansi seluruh item berada pada Sig. < 0,05, maka keseluruhan butir pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan memenuhi syarat validitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 4.** Hasil Uji reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar $\geq 0.70$	Keterangan
E-Government (X1)	0.842	Memenuhi	Reliabel
SIPKD (X2)	0.869	Memenuhi	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0.881	Memenuhi	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Variabel *E-Government* (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,842, variabel SIPKD (X2) sebesar 0,869, dan variabel Akuntabilitas (Y) sebesar 0,881. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas standar minimal 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner mampu memberikan hasil yang stabil dan konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, terutama dalam pengujian hipotesis dan regresi, karena tingkat reliabilitas yang tinggi mencerminkan kualitas instrumen yang baik dan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara akurat.

## Uji Normalitas

**Tabel 5.** Hasil Uji Normalitas.

Variabel	Statistic	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
Residual	0.067	0.200	Sig. > 0.05	Data normal

Hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai statistic sebesar 0,067 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,200, di mana nilai tersebut berada jauh di atas batas minimum 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan. Normalitas residual juga menandakan bahwa sebaran kesalahan (*error*) dalam model bersifat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara lebih akurat dan terpercaya.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria	Kesimpulan
E-Government (X1)	0.684	1.462	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
SIPKD (X2)	0.684	1.462	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu E-Government (X1) dan SIPKD (X2), memiliki nilai Tolerance sebesar 0,684 dan nilai VIF

sebesar 1,462. Nilai tolerance yang berada jauh di atas ambang batas 0,10 serta nilai VIF yang berada jauh di bawah batas maksimum 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan kata lain, *E-Government* dan SIPKD tidak memiliki hubungan linear yang sangat kuat satu sama lain sehingga tidak saling mengganggu dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini memastikan bahwa masing-masing variabel independen berkontribusi secara unik dan signifikan dalam model, sehingga hasil regresi yang dihasilkan lebih akurat, stabil, dan dapat diinterpretasikan dengan lebih terpercaya.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7.** Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
E-Government (X1)	0.453	> 0.05	Bebas heteroskedastisitas
SIPKD (X2)	0.612	> 0.05	Bebas heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel *E-Government* (X1) dan SIPKD (X2) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,453 dan 0,612. Kedua nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, varians residual bersifat homogen atau sama pada seluruh tingkat variabel independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut tanpa perlu melakukan transformasi data atau penyesuaian model.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data melalui SPSS menghasilkan nilai koefisien regresi, uji t, uji F, serta nilai koefisien determinasi yang tersaji pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan kontribusi masing-masing variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
Model					
Konstanta	1.112	0.245		4.548	0.000
E-Government (X1)	0.312	0.076	0.341	4.093	0.000
SIPKD (X2)	0.428	0.082	0.461	5.221	0.000
F Test	49.813				
Sig. F Test	0.000				

---

R square	.552
Adjusted R. Square	.544
Dependent Variabel : Akuntabilitas (Y)	

---

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 49,813 dengan signifikansi 0,000, yang berarti bahwa model regresi secara simultan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan kata lain, variabel E-Government (X1) dan SIPKD (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas (Y). Nilai R Square sebesar 0,552 dan Adjusted R Square sebesar 0,544 menunjukkan bahwa sebesar 54,4% variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara parsial, variabel E-Government (X1) memiliki nilai B sebesar 0,312, nilai t sebesar 4,093, dan signifikansi 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa E-Government berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa *E-Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Koefisien positif mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem E-Government—baik dari aspek digitalisasi layanan, transparansi informasi, maupun aksesibilitas—maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dicapai.

Sementara itu, variabel SIPKD (X2) menunjukkan nilai B sebesar 0,428, nilai t sebesar 5,221, dan signifikansi 0,000. Hasil ini menegaskan bahwa SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05, maka Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas juga diterima. Besarnya nilai koefisien B dan Beta (0,461) menunjukkan bahwa SIPKD memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan *E-Government*, sehingga efektivitas sistem informasi keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa model penelitian kuat dan signifikan, serta mendukung seluruh hipotesis yang diajukan. Kedua variabel independen terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, di mana SIPKD merupakan variabel dengan pengaruh terbesar dalam model.

## Pembahasan

### Pengaruh E-Government Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan *E-Government* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini. Koefisien regresi positif ( $B = 0.312$ ) mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas implementasi *E-Government*. Peningkatan aksesibilitas sistem, transparansi layanan *online*, dan kemudahan penggunaan berkaitan dengan peningkatan skor akuntabilitas. Besarnya Beta ( $0.341$ ) menunjukkan pengaruh moderat: *E-Government* memberikan kontribusi nyata terhadap variasi akuntabilitas, meskipun tidak sebesar kontribusi SIPKD dalam model yang sama.

Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM). Jika pegawai menilai bahwa *E-Government* berguna (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*), maka adopsi dan penggunaan sistem akan lebih tinggi, yang pada gilirannya menghasilkan alur kerja yang lebih terstandarisasi, jejak audit digital, dan pelaporan yang lebih tepat waktu. Dalam penelitian ini, karena responden mayoritas berlatar S1 dan pengalaman kerja menengah, persepsi positif terhadap kemanfaatan *E-Government* kemungkinan mendorong penggunaan aktif sehingga berdampak pada akuntabilitas. Dengan kata lain, *E-Government* bukan sekadar teknologi, tetapi mekanisme perilaku yang bekerja melalui penerimaan pengguna perspektif yang didukung oleh TAM.

Dari sisi *Good Governance*, *E-Government* berfungsi sebagai fasilitator prinsip transparansi dan akuntabilitas. Otomatisasi proses mengurangi ruang bagi praktik diskresi dan manipulasi manual, menyediakan data *real-time* untuk pengawasan internal dan eksternal, serta memungkinkan publikasi informasi yang meningkatkan kontrol sosial. Nilai pengaruh positif empiris dalam penelitian ini mendukung gagasan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan meningkatkan keterbukaan administrasi keuangan, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga daerah. Namun, besaran pengaruh yang moderat mengindikasikan bahwa teknologi saja tidak cukup, prinsip *good governance* harus diinternalisasikan oleh organisasi agar manfaat penuh tercapai.

*Institutional Theory* membantu menjelaskan variasi implementasi dan efek *E-Government* antar daerah. Tekanan koersif (regulasi pusat), normatif (ekspektasi profesional), dan mimetik (imitasi praktik sukses daerah lain) mendorong adopsi *E-Government* secara formal. Namun, fenomena *decoupling*, di mana adopsi formal tidak diikuti oleh perubahan praktik, menjelaskan mengapa pengaruh *E-Government* terhadap akuntabilitas tidak selalu maksimal. Temuan bahwa SIPKD memiliki pengaruh lebih kuat (koefisien lebih besar) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan sesuai fungsi operasional

(SIPKD) cenderung memberikan dampak langsung yang lebih besar pada proses akuntabilitas dibandingkan inisiatif *E-Government* yang bersifat lebih luas/layanan umum. Dengan kata lain, tekanan kelembagaan mendorong adopsi, tetapi kualitas pemanfaatan operasional menentukan besaran dampaknya.

Secara praktis, mekanisme spesifik yang menjelaskan bagaimana *E-Government* meningkatkan akuntabilitas antara lain: (1) pencatatan transaksi yang otomatis dan terstruktur sehingga mengurangi human *error*; (2) adanya log audit yang memudahkan penelusuran tindakan dan penyusunan laporan audit; (3) percepatan aliran informasi antarunit sehingga keputusan berbasis data dapat diambil lebih cepat; dan (4) kemudahan akses publik terhadap informasi tertentu yang meningkatkan pengawasan eksternal. Namun, hambatan implementasi seperti keterbatasan infrastruktur TI, rendahnya literasi digital pegawai, kurangnya pelatihan, dan resistensi budaya kerja seringkali mengurangi efektivitas *E-Government*, sehingga pengaruhnya menjadi lebih moderat. Hasil penelitian yang menunjukkan  $\text{sig.} = 0,000$  namun Beta yang sedang mengindikasikan kedua kondisi: efektivitas ada, tetapi ruang perbaikan juga nyata.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan peran *E-Government* dalam memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban publik (Indrajit, 2004; Dwivedi et al., 2019; Nurindahsari & Trisyanto, 2022). Perbandingan dengan studi terdahulu: Nurindahsari & Trisyanto (2022) melaporkan pengaruh E-Government signifikan terhadap akuntabilitas (kasus Kota Bandung), dan Dwivedi et al. (2019) menekankan peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas publik secara umum.

### **Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,428, nilai  $t$  sebesar 5,221, dan tingkat signifikansi 0,000. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara variabel independen, sehingga SIPKD dapat dikatakan sebagai variabel yang memiliki kontribusi paling dominan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Koefisien positif memperlihatkan bahwa semakin baik implementasi SIPKD, baik dari aspek fungsionalitas sistem, integrasi data, keandalan informasi, maupun kemudahan penggunaan semakin meningkat pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini secara empiris menegaskan bahwa sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akurat, dapat diaudit, dan transparan.

Hasil ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menekankan dua faktor utama dalam keberhasilan pemanfaatan teknologi, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. SIPKD sebagai sistem yang dirancang khusus untuk mendukung siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi bagi pegawai. Ketika pengguna meyakini bahwa SIPKD meningkatkan efektivitas, ketepatan waktu, dan akurasi pekerjaan mereka, maka tingkat penggunaannya juga meningkat. Peningkatan penggunaan inilah yang kemudian memengaruhi peningkatan akuntabilitas karena setiap transaksi dan proses keuangan terekam secara digital, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, SIPKD bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen yang memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui kemudahan akses data dan pengurangan potensi manipulasi.

Dalam perspektif *Good Governance*, SIPKD berperan penting dalam mewujudkan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dokumen penelitian ini menegaskan bahwa sistem informasi keuangan yang baik adalah sistem yang mampu menyediakan data keuangan secara real-time, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang melibatkan keterbukaan informasi, akurasi data publik, dan mekanisme pelaporan yang dapat diuji. Penerapan SIPKD memungkinkan setiap alur transaksi tercatat secara otomatis dan terstandarisasi, sehingga mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, meningkatkan keandalan pelaporan, dan memperkuat pertanggungjawaban aparat pengelola keuangan daerah. Dengan sifatnya yang terintegrasi dan berbasis teknologi, SIPKD mampu menghasilkan jejak audit (*audit trail*) yang jelas, yang merupakan elemen esensial dalam akuntabilitas publik.

*Institutional Theory*, penggunaan SIPKD juga dapat dipahami sebagai akibat dari tekanan institusional baik secara koersif (regulasi pemerintah pusat seperti Permendagri tentang sistem informasi keuangan daerah), normatif (tuntutan profesionalisme aparatur), maupun mimetik (adopsi praktik daerah lain yang sukses). Tekanan koersif melalui regulasi memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan sistem informasi keuangan yang seragam; tekanan normatif memastikan bahwa penggunaan sistem harus mengikuti standar akuntansi pemerintah; sedangkan tekanan mimetik membuat daerah mengikuti praktik terbaik dari daerah lain yang telah sukses meningkatkan akuntabilitas melalui SIPKD. Oleh karena itu, penerapan SIPKD tidak dapat dilihat hanya sebagai adaptasi teknologi, melainkan juga sebagai respons organisasi terhadap tuntutan legitimasi kelembagaan. Penelitian Anda menunjukkan bahwa

adaptasi tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak fungsional terhadap peningkatan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yaitu, studi oleh Rahayu dan Pertiwi (2022) menegaskan bahwa sistem informasi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena sistem tersebut memungkinkan proses pelaporan keuangan dilakukan secara lebih transparan dan terstruktur. Penelitian Nurindahsari dan Trisyanto (2022) juga menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang mendukung semangat transparansi dan akuntabilitas. Kedua penelitian yang dikutip dalam dokumen ini mengonfirmasi bahwa sistem informasi digital seperti SIPKD memiliki dampak langsung terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah, yang selaras dengan hasil penelitian Anda yang menunjukkan bahwa pengaruh SIPKD terhadap akuntabilitas paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Keberhasilan sistem informasi pemerintah tidak semata-mata bergantung pada teknologi, tetapi juga pada aspek organisatoris seperti kompetensi SDM, dukungan manajerial, dan budaya kerja. Temuan penelitian Anda mengindikasikan bahwa meskipun SIPKD bekerja secara teknis untuk memperkuat akuntabilitas, kualitas implementasi di tingkat pegawai menjadi faktor yang memperkuat pengaruh tersebut. Ini terlihat dari rendahnya standar deviasi persepsi responden terhadap SIPKD, yang menandakan bahwa pemanfaatan sistem relatif merata dan tidak menimbulkan kesenjangan adopsi antarpegawai.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa SIPKD merupakan faktor kunci dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik melalui fungsinya dalam mendukung transparansi dan pengawasan, maupun melalui fungsinya sebagai instrumen kelembagaan yang meningkatkan efektivitas tata kelola. Temuan ini memperkuat teori dan penelitian terdahulu bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah fondasi utama bagi pencapaian tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa E-Government dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana E-Government meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses layanan digital, sedangkan SIPKD menjadi faktor paling dominan karena mampu menyediakan pencatatan keuangan yang terintegrasi, transparan, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu; secara simultan kedua variabel tersebut terbukti signifikan dengan kontribusi sebesar 54,4% dalam menjelaskan

variasi akuntabilitas, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kapasitas SDM, pengawasan internal, dan budaya organisasi, sehingga temuan ini memperkuat kerangka teori Good Governance, Technology Acceptance Model (TAM), dan Institutional Theory serta konsisten dengan penelitian sebelumnya; oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, menggunakan pendekatan mixed methods agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, serta melakukan studi komparatif antar daerah guna melihat perbedaan tingkat implementasi digital dan dampaknya terhadap akuntabilitas.

## DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, B., Haryono, T., & Sari, D. P. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rejang Lebong: Studi empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 45–59.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewi, M. K., & Wulandari, S. (2023). Efektivitas penerapan SIPKD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali. *Jurnal Teknologi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 112–127. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.4619>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Fitriani, N., & Solikhin, M. (2023). Peran SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 6(3), 85–98.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446220191>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Khumaidi, M., Sari, R. Y., & Lestari, F. (2023). Dampak implementasi IT governance pada SIMKDA terhadap efisiensi dan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan*, 9(1), 33–49.
- Kompas. (2024, February 14). 66 Pemda belum optimal gunakan sistem digital keuangan daerah. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/ekonomi/read/2024/02/14/123456/66-pemda-belum-optimal-gunakan-sistem-digital>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Nurindahsari, L., & Trisyanto, D. (2022). Pengaruh e-government terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). Making e-government work in Indonesia: The struggle for transparency and accountability in the digital era. *Electronic Journal of e-Government*, 13(1), 65–75.
- Rahayu, R., & Pertiwi, I. D. (2022). Good governance dan transparansi keuangan daerah: Analisis peran teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(2), 154–170.
- Ramli, A., & Fitri, S. (2021). Persepsi pengguna terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 18(3), 43–57.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- World Bank. (2000). *Reforming public institutions and strengthening governance: A World Bank strategy*. World Bank.